



PERLUASAN LAPANGAN KERJA

(Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)



Penulis:
Lodewijk Luis Wanggai

Editor:
Bernarda Meteray

PERLUASAN LAPANGAN KERJA

(Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)

Penulis:
Lodewijk Luis Wanggai



**PERLUASAN LAPANGAN KERJA
(Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)**

Penulis:
Lodewijk Luis Wanggai

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bernarda Meteray

ISBN:
978-623-459-438-6

Cetakan Pertama:
April, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PENGATAR PENULIS

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya dengan diiringi alunan suara burung-burung dan ombak alamku Papua, pujian Syukur, suka dan duka, sedih, jatuh dan terbangun bahkan melelahkan hampir-hampir kepada keputusasaan, saya melewati semua itu hanya dengan senandung do'a "Syukur bagi-Mu Tuhan" (3x...), sehingga tulisan ini akhirnya menjadi buku dengan judul "Perluasan Lapangan Kerja (Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)". Tulisan ini adalah mutan pengembangan dari disertasi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh Gelar Doktor di Bidang kajian Ilmu Sosiologi pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua.

Buku ini diharapkan dapat menjadi model penguatan modal sosial dalam kerangka perluasan lapangan kerja dan permasalahan sosial ketenagakerjaan.

Satu hal yang mendorong penulis melakukan kajian buku ini, yakni ingin memberikan sumbangan pemikiran tentang pemahaman modal sosial dan modal lainnya sebagai sumber daya, aktual atau virtual (tersirat), yang dioptimalkan sebagai pendekatan kepada semua pemangku kepentingan dalam upaya mengoptimalkan kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, maupun jaringan dalam proses aspirasi perluasan lapangan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal bagi Orang Asli Papua dalam tindakan afirmatif, karena sebelum penulis memulai meneliti, penolakan terhadap pemahaman kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maupun Papua Barat yang sejak Papua menjadi wilayah Republik Indonesia tahun 1962 sampai tahun 2001. Selama jangka waktu itu, Papua hanya menjadi lahan eksploitasi kekayaan sumber daya alam oleh negara. Sementara rakyatnya dibiarkan tetap hidup merana. Hal ini menandakan puncak dari kekecewaan rakyat Papua meminta berpisah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Otonomi Khusus diberikan sebagai alternatif mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di Papua.

Pengkajian atau analisis di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat membuktikan bahwa adanya pemahaman ketidakadilan maupun stigma yang dialami puluhan tahun oleh Orang asli Papua yang ada. Hal ini terjadi sebelum diberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001, dimana telah terjadi pertentangan atau persaingan antara migran/pendatang dengan

Orang Asli Papua yang ada, baik pedagang kecil maupun sektor industri yang sering dikorbankan demi pembangunan ketenagakerjaan.

Selama ini, proses perluasan lapangan kerja maupun kesempatan kerja hanya melibatkan Individu, kelompok atau komunitas tertentu seperti ikatan Toraja, Jawa, Batak, Bugis Makasar dan suku-suku lain yang tinggal di Tanah Papua dan bahkan dari luar Papua. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan perasaan orang Papua. Karena hal ini juga akan membuat Orang Asli Papua yang ada sendiri tidak percaya diri, saling curiga-mencurigai sesama Orang Asli Papua yang ada, serta menimbulkan konflik dengan orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai migran atau pendatang.

Dari segi pemahaman modal sosial yang dikonversikan dengan modal lainnya, merupakan sumber daya yang diintegrasikan sebagai pengetahuan paradigma konstruktivisme yang saling terhubung dan bermakna ke dalam model strukturisasi perluasan lapangan kerja baik di sektor informal maupun sektor formal. Hal ini merupakan kolaborasi simbol dan strategi yang spesifik dalam mempengaruhi tindakan/interaksi bagi Pelaksana Kebijakan (Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, TNI/Polri dan Swasta), untuk berkoordinasi dengan Pembuat Kebijakan (DPR Kabupaten/Kota/Provinsi) maupun Representasi Kultur Penentu (MRP/LMA).

Memahami dan memaknai proses strukturisasi model penguatan modal sosial menurut Wanggai ini, sesungguhnya merupakan properti spesifik dari sebuah fenomena sosial yang merupakan jembatan/perantara bagi Pelaksana Kebijakan dengan Representasi Kultur Penentu maupun Pembuat Kebijakan dalam tindakan/interaksi afirmatif sebagai wujud kebijakan dalam proses perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang ada, yang selama ini masih adanya sikap saling tidak percaya antar sesama Orang Asli Papua yang ada maupun dengan orang pendatang atau orang yang memposisikan diri sebagai migran/pendatang. Oleh karena itu upaya mempertahankan dan melestarikan kearifan tersebut dari generasi ke generasi hingga saat ini sebagian besar masih berlangsung secara verbal.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kajian ini adalah sebagai berikut: **satu**, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat maupun Lembaga Masyarakat Adat sebagai representasi kultur penentu tidak bisa diabaikan keberadaannya, maka harus tetap dihargai sebagai lembaga regulatif, normatif, dan kultural-kognitif dalam relasi sosial untuk memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang ada, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan pekerjaan ini karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maupun Papua Barat (UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 64 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua), Pasal 20;

Pasal 21 dan Pasal 36 secara tegas telah mengamanatkan kepada MRP/MRPB, yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang diimplikasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pembangunan oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Tanah Papua; **dua**, pandangan dan interpretasi serta pemaknaan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua yang ada, tidak terbatas hanya pada pemberian uang serta pembangunan infrastruktur semata tetapi perlu di bangun proses strukturisasi Model Penguatan Modal Sosial Wanggai (MPMSW), sebagai strategi dan tindakan kepercayaan sosial (*social trust*) maupun norma dan nilai-nilai budaya setempat. Sementara itu fakta di lapangan selama ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat Papua, khususnya konflik antar Orang Asli Papua yang ada dengan Orang Asli Papua yang ada dan antar komunitas maupun orang yang memposisikan diri migran atau pendatang telah terbukti lebih tepat menggunakan model penguatan modal sosial sebagai strategi atau alternatif untuk berkolaborasi antara pelaksana kebijakan, representasi kultur penentu maupun pembuat kebijakan; dan **tiga**, setiap pelaksana maupun pembuatan kebijakan dalam merencanakan strategi program pembangunan infrastruktur manusia, dari segi perluasan lapangan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal bagi Orang Asli Papua yang ada. Hal ini perlu berkolaborasi dengan Representasi Kultur Penentu (MRP/MRPB ataupun LMA), sebagai implikasi penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat (UU. No. 21 Tahun 2001) Pasal 62 ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan kepada Pelaksana Kebijakan (Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, TNI/Polri dan Swasta), sebagai penyelenggara negara dengan mengutamakan Orang Asli Papua yang ada, untuk berhak memperoleh pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Perkenankanlah saya mengucapkan hormat dan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan yang sangat berarti, sehingga penulisan ini berhasil diselesaikan.

Ucapan terima kasih saya kepada Tim Promotor maupun *Co-Promotor* dengan penuh ketulusan dan kasih, kami menyebut Maha Guru dan Maha Terpelajar, Prof. Dr. Dra. Onnie M. Lumintang, M.Hum; Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT; Dr. Nomensen St. Mambraku, yang selalu memberikan saran maupun petunjuk, hingga penulisan ini berhasil diselesaikan.

Rasa terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa koreksi dan usulan/saran, kami menyebut

Maha Guru dan Maha Terpelajar, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS; Johszua Robert Mansoben, MA, Ph.D; Dr. Bernarda Meteray; Dr. Dra. Lenny Manalip, M.Si; Dr. Septinus Saa, S.Sos, M.Si; Dr. Andi Masyohoro, M.Sc (eksternal), yang sangat membantu penulis dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga sampai selesai penulisan.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril untuk terus berkarya kepada penulis.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Yohanes Rante, SE, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh studi sampai selesai.

Prof. Dr. Dirk Veplum, MS sebagai ketua Program Studi Magister Sosiologi yang telah banyak memberikan masukan dan kritikkan terhadap saya serta masukkan tentang pemamahan ilmu-ilmu sosial terutama ilmu sosiologi. Kepada beliau, saya ucapkan terima kasih.

Bapak Dr. Thobby Wakarmamu, M.Si yang sejak awal membimbing dan mengarahkan saya dalam proses Pengkajian atau analisis, hingga penulisan disertasi ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Dr. Enos H. Rumansara, M.Si (alm) yang sejak awal telah membimbing saya dalam penulisan disertasi. Di tengah kesibukan, beliau tetap menanyakan kemajuan penulisan disertasi. Terakhir di ruang Asisten Direktur I Pascasarjana Universitas Cenderawasih, itu telah membawa kenangan tersendiri dengan beliau. Pesan terakhir beliau sampaikan tolong tuliskan disertasi sendiri, jangan memberikan kepada orang lain untuk menulis. Pak Enos selamat jalan, jasa Bapak tidak akan pernah saya lupakan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Lodewijk Luis Wanggai dengan judul penelaahan mengenai Model Penguatan Modal Sosial Dalam Kerangka Perluasan Lapangan Kerja Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada Universitas di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atas segala informasi yang disampaikan kepada saya. Kepada Dr. Ir. Agus Sumule, AKBP. Murwoto, Chritian Warinusi, SH, M.Hum, Max Hahoren, Obeth Ayok/Rumruren dan Bapak Pdt. Moses Mosioi dan lain-lain yang tak sempat menyebutkan nama-namanya. Terima kasih atas segala informasi dan dukungan, hingga penulisan disertasi ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bapak Benyamin Arisoy, SE, M.Si mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua yang senantiasa memberi motivasi maupun kebijakan, dalam bentuk bantuan biaya studi akhir yang sangat membantu saya melakukan Pengkajian atau analisis di Kabupaten Manokwari. Kepada beliau, saya ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Yan Piet Rawar mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua yang telah memberikan izin maupun kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 di Universitas Cenderawasih, terima kasih atas bantuan selama ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Dosen dan staf administrasi pada program pascasarjana S3 Ilmu sosial Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan bimbingan maupun ilmu pengetahuan serta para staf administrasi yang membantu demi kelancaran mulai awal perkuliahan sampai pada tahap akhir studi. Saya ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih tak terhingga khusus kepada kedua orang tua tercinta yang telah pergi untuk selamanya saya sampaikan kepada Samuel Wanggai (almarhum) dan Yosina Waromi (almarhumah) sejak awal membesarkan dengan setetes air susu ibu maupun menyekolahkan, saya tidak pernah melupakan nasihat dan jasa baik kedua orang tuaku. Tak lupa Saudaraku Suzana A. Wanggai/Mori-Muzendi, Lisbeth O. Wanggai, S.Sos, M.Si/Kehek; Otto P.M. Wanggai, SE, MM; Eduard F.R. Wanggai, S.Sos (Almarhum); Weinan Y. Wanggai, SE, MM; Nelly R. Wanggai, S.Sos/Karubuy; Zakeus J. Wanggai, SP, MM; beserta keponakan Silvani A. Mori-Muzendi, SP, M.Si selaku PD II Fakultas Kedokteran Universitas Papua.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya dari lubuk hati yang paling dalam ditujukan kepada istri tercinta Mariana T. Wambrauw, S.Pd atas kemuliaan hatinya dengan rela memberi pengorbanan lahir batin demi keberhasilan saya, tak lupa aku sampaikan kepada kedua anakku tersayang Virginia F. Wanggai maupun Enggelina S.N. Wanggai, atas kesabaran dan motivasi walaupun kami berada dalam keadaan yang hampir-hampir tak sanggup lagi untuk melangkah melanjutkan studi ini.

April, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PENGATAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENGANTAR MODAL SOSIAL UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA ...	1
A. Pengenalan Modal Sosial dalam Perluasan Lapangan Kerja	1
B. Teori Perluasan Lapangan Kerja	9
BAB 2 TEORI DAN KONSEP MODAL SOSIAL DALAM KERANGKA PERLUASAN LAPANGAN KERJA	17
A. Konsep Modal Sosial Maupun Modal Lainnya	17
B. Elemen-Elemen Modal Sosial	23
BAB 3 MODAL SOSIAL DAN MODAL LAIN	29
A. Konsep Sosial	29
B. Hubungan Antara Kapital	31
BAB 4 RELASI KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DAN KERAGAMAN TINDAKAN AFIRMATIF	39
A. Relasi Modal Sosial dengan Modal Lainnya	39
B. Modal Sosial Sebagai Kebijakan	46
C. Hubungan <i>Habitus</i> , Arena/Ranah dan Praktik Sosial	48
D. Modal Sosial Sebagai Keragaman Tindakan Afirmatif	53
BAB 5 PANDANGAN PEMBERDAYAAN MAUPUN KEBERPIHAKAN	61
A. Pemberdayaan Perluasan Lapangan Kerja	61
B. Keberpihakan Perluasan Lapangan Kerja	67
BAB 6 KONTRUKSI MODEL MODAL SOSIAL UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA BAGI ORANG ASLI PAPUA	69
A. Konstruksi Model Elemen Modal Sosial dalam Kerangka Perluasan Lapangan Kerja	69
B. Konstruksi Orang Asli Papua yang Ada Bekerja di Sektor Formal Ketimbang di Sektor Informal	83
BAB 7 KONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI PENGUATAN MODAL LAINNYA	89
A. Konstruksi Modal Sosial Sebagai Penguatan Modal Ekonomi	89
B. Konstruksi Modal Sosial Sebagai Penguatan Modal Budaya/Kultur	91
C. Konstruksi Modal Sosial Sebagai Penguatan Modal Simbolik	95
BAB 8 ANALISIS KORELASI DAN REGRESI SEDERHANA	99
A. Rekonstruksi Modal Sosial Sebagai Sarana Jembatan Afirmatif	99
B. Rekonstruksi Elemen-Elemen Modal Sosial Sebagai Relasi Sosial	105

C. Rekonstruksi Kecenderungan Orang Asli Papua yang Ada Sebagai Pekerja	113
BAB 9 REKONSTRUKSI ANALISIS PENGUATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI RELASI MODAL LAINNYA	119
A. Rekonstruksi Penguatan Modal Sosial Sebagai Relasi Modal Lainnya	119
B. Analisis Rekonstruksi Penguatan Modal Sosial Sebagai Relasi Modal Lainnya	124
C. Analisis Rekonstruksi Kondisi Ril Dilapangan	130
BAB 10 SARAN PANDANG	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
C. Rekomendasi	142
DAFTAR PUSTAKA	143
GLOSARIUM	150
INDEKS	153
PROFIL PENULIS	155



PENGANTAR MODAL SOSIAL UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA

A. PENGENALAN MODAL SOSIAL DALAM PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan sebuah kebijakan politik bangsa Indonesia kepada bangsa Papua, disaat Orang Asli Papua menyampaikan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri atau ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka solusi yang diambil adalah otonomi khusus pada tahun 2001. Sepanjang otonomi khusus berjalan selama 5 (lima) tahun, maka ada evaluasi yang diprakarsai oleh Pemerintah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) antara lain bidang ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 62 ayat (2), sebagai hasil evaluasi 5 (lima) tahun yaitu 2002-2006, dalam perspektif ketenagakerjaan bahwa pemerataan program dan kegiatan antar wilayah perkotaan dan kampung, tampaknya belum memadai. Terbukti dari banyak program ketenagakerjaan yang difokuskan di perkotaan atau perusahaan-perusahaan berskala menengah. Sebagian besar penerima manfaat program ini adalah masyarakat asli Papua. Terutama sekali dalam hal pembinaan keterampilan berusaha. Sementara program lainnya yang ditunjukkan pada peningkatan kapasitas perusahaan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat *non* Papua Bappeda dan Uncen (2010:24). Jika dilihat dari perspektif positif diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kenyataan dari tahun ke tahun Badan Pusat statistik menyatakan jumlah penduduk terbanyak selama ini di Provinsi Papua Barat terdapat pada Kota Sorong dengan 255.588 jiwa di tahun 2015, sedangkan penduduk tersedikit adalah di Kabupaten Tambrauw dengan 13.615 jiwa,



TEORI DAN KONSEP MODAL SOSIAL DALAM KERANGKA PERLUASAN LAPANGAN KERJA

A. KONSEP MODAL SOSIAL MAUPUN MODAL LAINNYA

Banyaknya perdebatan tentang modal sosial sebagai alat kebijakan, masih berlangsung sampai sekarang dan belum terdapat kata sepakat tentang fenomena sosial tersebut. Fakta menunjukkan bahwa modal sosial membawa konsekuensi yang terlepas dari faktor struktural yang berarti bahwa, prinsipnya wawasan dalam perdebatan tentang modal sosial harus dapat diterapkan (Field, 2010).

Modal sosial ditetapkan berdasarkan fungsinya. Modal sosial bukan entitas tunggal tetapi bermacam-macam entitas berbeda yang memiliki dua karakteristik umum. Hal ini terdiri atas beberapa aspek struktur sosial, dan beberapa tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut. Seperti bentuk modal lainnya, modal yang bersifat produktif, memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Seperti modal fisik dan modal manusia, modal melekat pada struktur relasi di antara orang dan di kalangan orang. Letak modal sosial bukan pada individu ataupun alat produksi fisik (Coleman 1994).

Modal sosial pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu yang sering digunakan acuan oleh tokoh-tokoh lain dalam mendefinisikan modal sosial. Menurut Bourdieu (1992), modal sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual (*tersirat*) yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalkan.



MODAL SOSIAL DAN MODAL LAIN

A. KONSEP SOSIAL

Menurut Lawang (2004), ada beberapa konsep tambahan yang perlu dimasukkan ke dalam pembahasan sosiologik tentang kapital sosial. Konsep-konsep itu merupakan alat analisis untuk melihat kapital sosial itu dalam wujud pelaksanaannya yang mempunyai fungsi terhadap kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha *non* ekonomi. Kedua konsep itu adalah interaksi sosial dan sikap.

1. Interaksi Sosial

Lawang (2004) berpendapat bahwa seorang yang belajar sosiologi tidak mungkin lepas dari konsep ini, merupakan alasan yang mudah dimengerti. Dalam modal sosial, konsep ini juga penting, karena kapital sosial selalu dilihat dalam hubungannya dengan kegiatan bersama, kelompok atau jaringan, dimana interaksi sosial merupakan media paling utama. Sebelum konsep interaksi itu dijelaskan, perlu memperoleh pemahaman mengenai konsep tindakan (*action*) yang lebih banyak menyangkut kegiatan individu, tanpa harus menghubungkannya dengan orang lain.

2. Tindakan Sosial

Lawang (2004) menyatakan bahwa tindakan (sosial) yang diambil seseorang merupakan hasil dari keputusan pribadinya untuk melakukan sesuatu. Keputusan untuk bertindak biasanya diambil dengan pertimbangan makna atau nilai yang ada pada seseorang, Lawang mendukung Max Weber perlu dipandu oleh norma, nilai, ide-ide di satu pihak dan kondisi situasional di lain pihak, dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan cara-cara yang menurut pertimbangan subjektif efektif dan efisien (Parson, 1935). Jadi, tindakan sosial itu ada strukturnya. Struktur tindakan dalam



**BAB
4**

RELASI KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DAN KERAGAMAN TINDAKAN AFIRMATIF

A. RELASI MODAL SOSIAL DENGAN MODAL LAINNYA

1. Relasi Modal Sosial sebagai Modal ekonomi

Damsar (Damsar 2009) berpendapat bahwa hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh-mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan dimana memproduksinya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama. Dalam aspek agama Kristen, masyarakat-masyarakat Wegee dianggap sebagai suatu persekutuan iman. Para pengikut persekutuan ini menolak untuk mengambil bagian dalam pesta babi Yuwo, suatu upacara paling penting dalam kebudayaan Ekagi. Mereka juga menolak dengan keras pemakian uang tradisional yang terdiri dari kerang, suatu unsur yang penting sekali dalam sistem ekonomi dan struktur sosial Ekagi. Menurut anggapan uang ini merupakan sumber perselisihan dan merupakan juga halangan untuk memperoleh hidup yang kekal (Mote1976;Pospisil 1978: 110-112).

BAB 5

PANDANGAN PEMBERDAYAAN MAUPUN KEBERPIHAKAN

A. PEMBERDAYAAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Pemberdayaan perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun sektor informal yang di pandang strategi alternatif pemecahan masalah keterbatasan perluasan lapangan kerja. Sektor informal berfungsi sebagai katup pengaman yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun orang-orang yang memposisikan diri sebagai migran atau pendatang, yang merupakan fenomena atau gejala sosial bagi Pemerintah Indonesia dalam pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua, bertujuan untuk mengimbangi kelebihan-kelebihan yang dianggap sudah dimiliki oleh suku-suku bukan Orang Asli Papua lain, yang sudah diuntungkan oleh sistem. Hakikat dari pelaksanaan kebijakan perlakuan Otonomi Khusus pada prinsipnya didasari atas berbagai persoalan ketimbangan yang dialami oleh suatu komunitas masyarakat minoritas, guna adanya pemberdayaan dan keberpihakan demi tercapainya pemerataan dan keadilan dan pandangan Orang Asli Papua yang ada, dalam implikasi penerapan Otonomi Khusus.



Gambar 5.1 Peneliti Bersama Ketua MRPB Max Hahoren.



KONTRUKSI MODEL MODAL SOSIAL UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA BAGI ORANG ASLI PAPUA

A. KONSTRUKSI MODEL ELEMEN MODAL SOSIAL DALAM KERANGKA PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelum ini, maka strukturisasi model penguatan modal sosial Wanggai (MPMSW) dalam kerangka perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Manokwari (lihat Gambar 6.1). Secara umum dan luas, untuk memahami modal sosial yang dikonversikan ke dalam modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik sebagai makna dari hakikat elemen kepercayaan, jaringan, norma atau nilai dalam kerangka tindakan/interaksi perlindungan hak-hak dasar bagi Orang Asli Papua yang ada oleh pelaksana kebijakan representasi kultur penentu maupun pembuat kebijakan sebagai kelembagaan, yang berisi sekelompok orang atau individu dalam kelompok yang bekerja sama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Hal ini representasi kultur penentu diberikan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 20. Selanjutnya Representasi Kultur Penentu, perlu diatur secara proporsional dalam proses perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun sektor informal sebagai jembatan/perantara dalam harapan afirmatif dari sisi keberpihakan serta pemberdayaan bagi Orang Asli Papua yang ada.



KONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI PENGUATAN MODAL LAINNYA

A. KONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI PENGUATAN MODAL EKONOMI

Pengkajian atau analisis Putnan (2000) memperlihatkan bahwa modal sosial sebagai perilaku mencari kerja para migran dan pekerja muda selama tahun 1970-an tidak banyak membawa dampak pada debat yang lebih luas tentang modal manusia di kalangan para ekonomi yang kebanyakan cenderung melihat kualifikasi dan sekolah sebagai sumber bagi dapat dipekerjakannya yang bersangkutan. Namun tidak terlalu mengejutkan bahwa keluarga, yang didukung oleh hubungan lain yang berbasis kekerabatan, memainkan peran penting dalam pencarian kerja. Pengkajian atau analisis Granovetter, menekankan nilai dari apa yang disebutnya dengan ikatan lemah, memberikan akses kepada pencari kerja pada informasi yang lebih banyak tentang berbagai kesempatan yang lebih beragam (Granovetter, 1973). Namun, hal ini harus diperbandingkan dengan upaya yang lebih keras yang akan dilakukan oleh kenalan dekat untuk mencari pekerjaan bagi orang tersebut. Lebih dari setengah sampel Korpi tidak mendekati teman ataupun kenalan ketika menganggur, mereka yang melakukannya hampir hanya selalu melakukan pendekatan terhadap kenalan dekat (Korpi, 2001). Ia menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang jelas tentang perbedaan hasil antara mereka yang menggunakan ikatan kuat dengan yang menggunakan ikatan lemah (Korpi, 2001:167). Yang lebih penting, modal sosial yang mengikat terlihat sama efektifnya dengan modal sosial yang menjembatani. Pengkajian atau analisis Bourdieu, yang dinilainya mengabaikan hambatan struktural dalam interaksi sehari-hari. Bourdieu dalam melihat posisi aktor



ANALISIS KORELASI DAN REGRESI SEDERHANA

A. REKONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI SARANA JEMBATAN AFIRMATIF

Modal sosial itu pula dasarnya adalah salah satu sarana jembatan afirmatif dalam tindakan serta interaksi sebagai relasi sosial antara representasi kultur penentu dengan pembuat kebijakan yang dilaksanakan oleh agen-agen pelaksana seperti, Pemerintah, TNI/Polri dan Swasta sebagai penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 62 ayat (2), bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun prinsip sinergi tetap berlaku agar modal sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial mencapai tujuan bersama, ada dua parameter modal sosial sebagai tindakan afirmatif dalam penguatan perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun sektor informal bagi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Manokwari yaitu:

1. Aspek Pemberdayaan

Aspek pemberdayaan mengandung nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada daratan individual dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial maupun kesempatan kerja. Hasil dalam Pengkajian atau analisis ini, berdasarkan D.Ronsumbre bahwa saat itu ada program pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten, setelah selesai pelatihan disampaikan kepada peserta, untuk membuat proposal bantuan, karena menurut informan peralatan produksinya sudah rusak alias tidak dapat dipakai lagi. Hal ini mengakibatkan produksi Abon ikan mengalami kerugian dan pelanggannya



REKONSTRUKSI ANALISIS PENGUATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI RELASI MODAL LAINNYA

A. REKONSTRUKSI PENGUATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI RELASI MODAL LAINNYA

Bourdieu, (dalam Suyanto 2013:249) mengatakan bahwa modal mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolis dan memiliki signifikansi secara kultural. Arti modal di sini bukanlah modal sebagai mana dipahami dalam disiplin ilmu ekonomi. Bentuk dan wujud modal bisa beragam, pada ranah yang menentukannya. Artinya, sesuatu yang dihargai dan telah menjadi modal, maka tidak otomatis menjadi modal atau sesuatu yang berharga di ranah lainnya. Selanjutnya untuk mewujudkan relasi sosial tersebut, ada tiga parameter modal lainnya yang dapat digunakan dalam menganalisis hasil Pengkajian atau analisis dari upaya mewujudkan proses perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Manokwari, yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik.

1. Modal Sosial Sebagai Relasi Modal Ekonomi

Field (2003:81) mengemukakan bahwa ekonomi bukan sesuatu yang asing bagi gagasan bahwa mungkin saja terdapat perbedaan tipe modal. Terpenting bagi tujuan analisis, bahkan para ekonom tertarik pada konsep modal manusia sejak awal tahun 1960-an. Selanjutnya Field menyampaikan juga bahwa cara untuk menunjukkan kontribusi tenaga kerja bagi kinerja dalam perusahaan. Hal ini Schultz menyatakan bahwa nilai potensial kontribusi tenaga kerja bisa meningkat, karena investasi yang tepat, karena



SARAN PANDANG

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengkajian atau analisis ini adalah:

1. Peran elemen-elemen modal sosial, yang dikonstruksikan ke dalam kepercayaan, jaringan, norma atau nilai belum sepenuhnya dipahami maupun dimaknai sebagai relasi sosial dalam penguatan sumber daya oleh kelompok atau individu, seperti Pembuat Kebijakan, Representasi Kultur Penentu maupun Pelaksana Kebijakan sebagai proses tindakan afirmatif bagi Orang Asli Papua yang ada dalam kerangka perluasan lapangan kerja baik di sektor informal maupun sektor formal. Hal ini, nampak dari hasil Pengkajian atau analisis, (1) adanya ketidakseimbangan pengetahuan dan pemahaman makna kepercayaan; (2) orang asli Papua yang ada saling tidak adanya kepercayaan, saling curigai satu sama yang lain, rasa minder; (3) rasa ketidakadilan; (4) pihak pemerintah dalam pemberdayaan tidak ada tindak lanjut.
2. Alasan Orang Asli Papua yang ada lebih memilih bekerja di sektor formal ketimbang di sektor informal, karena memahami dan memaknai bekerja di sektor formal dapat memberikan jaminan masa depan (terutama pendapatan/gaji tiap bulan dan memperoleh pensiun), dan juga dalam sistem yang pasti memberikan jaminan masa depan. Hal lain nampak dari hasil Pengkajian atau analisis ini adalah bekerja di sektor formal, apakah dalam bekerja diperlakukan adil atau tidak. Disamping itu, alasan Orang Asli Papua yang ada memahami maupun memaknai pekerjaan di sektor informal sebagai usaha yang bersifat konsumtif dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena belum adanya rencana pengembangan strategi sektor informal kearah usaha komersial, oleh sebab budaya orang Melanesia, dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. dan Robinson J.A. (2012). Mengapa Negara Gagal. Awal mula Kekuasaan Kemakmuran, dan Kemiskinan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Arisandi. Herman. 2015. Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern. Banguntapan. Yogyakarta.
- Azis Moh. Ali. Dkk. 2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Bourdieu, P. And Wacquant, L. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago. University of Chicago Press.
- Bungin B. 2007. Analisis Data Pengkajian atau analisis Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Coleman J.S. 1994. Foundations of Social Theory. Penerjemah Iman Muttaqien. Derta Sri Widowatie. dan Siwi Purwandari. Dasar-dasar Teori Sosial. The Belknap Press of Harvard University. Nusa Media Bandung.
- Creswell. J. 2009. Research design: Qualitative. Qualitative and Mixed Methods Approaches, sage. Thousand Oaks.
- Damsar.2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pengantar Sosiologi Politik. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Elisabeth Adriana. 2017. Updating Papua Road Map. Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Tim Kajian Papua-LIPI. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Emzir. 2010. Metodologi Pengkajian atau analisis Kualitatif, Analisis Data. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Fatem Agustinus. 2013. Refleksi Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Disampaikan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Cenderawasih.
- Field John. 2003. Social Capital. Penerjemah Nurhadi. Modal Sosial. London: Routledge. Kreasi Wacana. Bantul

- Francois, P. 2003. *Sosial Capital and Economic Development*. London: Routledge.
- Frick, JE., Eriksson, LT., Hallen, L. 2012. Effects of Social Capital on Processes in A Regional Strategic Network. *Industrial Marketing Management* 41, pp: 800-806
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Sosial Virtues and The Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton.
- 1997. *Sosial Capital ang The Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace*. Stren Bussiness Magazine Vol.4 no.1.
- 2001. *Sosial Capital, Civil Society, and development*. Third Word Quarterly, 22(1):7-200.
- Gainau Watson Aldrin, 2012. *Papuanisasi Birokrasi Papua Mengkaji Kebijakan Perlakuan Istimewa bagi SDM yang ada di Birokrasi Kabupaten Jayapura*. Capiya Publishing.
- Garna J.K. 2003. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi* . Primaco Akademis CV. Bandung
- Gary Dessler. 1997. *Human Resource Management*. Penerjemah: Triyana Iskandarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prentice-Hall.Inc. Perpustakaan Nasional. . Jakarta.
- Giddens A. 1984. *The Constitution of Society; Outline of the Theory of Structuration*. Penerjemah Maufur dan Daryanto. *Teori Strukturisasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur*. University of California Press. USA. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- 1994. *Living in A Post-Traditional Society*. Penerjemah Ali Noer Zaman. *Masyarakat Post-Tradisional*. Polity Press, Cambridge. Penerbit IRCiSoD, Yogyakarta.
- Giddens, Daniel Bell, Michael Forse.etc. *La Sociologie. Histoire et ideas*. Penerjemah Ninik Rochani Sjams. *Sosiologi. Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi; Yogyakarta.
- Ha, Seong-Kyu. 2010. *Housing, Sosial Capital and Community development in Seoul*. *Cities* 27 (2010).
- Hanneman Samuel, 2010. *Emile Durkheim: riwayat, Pemikiran, dan Warisan Bapak Sosiologi Modern*. Penyunting: Geger Riyanto. Bukit Cengkeh 1 Cimanggis. Depok.
- Hasbullah, J. 2006. *Sosial Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Karma. Constant 2005. *Pengembangan Ekonomi Kereakyatan di Papua dari Sederhana ke Kompleks*. Jayapura.

- Kassa, A. 2009. Effects of different dimension of social capital on inovative activity: Evidance from Europe at Regional Level. *Technovation* 29, pp: 218-233
- Keagop, P (2010), Rekam jejak Majelis Rakyat Papua 2005-2010. Jayapura: Suara Perempuan Papua.
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar. 1963. Penduduk Irian Barat. Universitas Indonesia, Jakarta
- 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Universitas Indonesia, Jakarta
- Krishna, A., dan Uphoff. 1999. Conceptual and Empirical study of Collective Action for Conserving and Developing Watershed in Rajasthan India. *Sosial Capital Inisiative Working Paper No.13. The World Bank.*
- Lawang, R.M.Z, 2004. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar. FISIP Universitas Indonesia Press
- Lesser, E.2000. *Knowledge and Sosial Capital: Foundation and Application*, Boston-Boutterwhorth-Heinneman.
- Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X.,Zhao, X., Liang, Z. 2014. The Role of Sosial Capital in encouraging Residents' pro-environmental Behaviours in Community Based Ecotourism. *Tourism Management* 41, 190-201
- Lopez, A.F., Catarina, R.P., Tiago, N.S. 2012. When Sociable Workers Pay-Off: Can Firms Internalize sosial Capital Eksternalities. *Structural Change and Economic Dynamics* 23, 127-136
- Lukatela, A. 2007. *The Importance of Trust-Building in Transition: A Look at Sosial Capital and Democratic Action in Eastern Europe*. Canadian Slanovic paper pp. 49
- Lyon, F. 2000. Trust, Network and Norms: The Creation of Sosial Capital in Agricultural Economies in Ghana. *World Development Vol. 28, No. 4*
- Majelis Rakyat Papua (MRP), 2007, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Kewenangan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Jayapura.
- Moleong, Lexy, 1990. Metodologi Pengkajian atau analisisn Kualitatif. Cetakan Kedua, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- 2006. Metodologi Pengkajian atau analisisn Kualitatif, Edisi Revisi, Cetakan Keduapuluh dua, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Pengkajian atau analisisn Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nahapit, J. Dan Ghoshal, S. 1998. Sosial Capital, intellectual Capital, and the Organizational Advantage. *The Academy of Management Review*, 23 (2).
- Nasdian F.T. 2014. Pengembangan Masyarakat, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

- Peyon Ibrahim A. 2012. *Antropoligi Kontemporer*, Suatu Kajian Kritis Mengenai Papua. Kelompok Studi Nirentohon.
- Portes, Alejandro. 1998. Sosial Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology. *Annual Review Sociology*, vol. 24: 1-24.
- Pretty, J., Smith, D. 2003. Sosial Capital in biodeversity conservation and management. *Consevation Biology* 18, 631-638
- Ward, H. 2001. Sosial Capital and The Environment. *World Development Vol. 29, No. 2*.
- Putnam RD. 2000. *Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster, New York.
- 1995. Turning In, Turning Out: The Strange Disappearance of Sosial Capital in America. *Political Science and Politics* 28.
- 1993. *The Prosperous Community: Sosial Capital and Public Life*. The American Prospect No. 13 Spring.
- Rante Yohanis. 2013. Perilaku Kewirausahaan dan Budaya Lokal pada Usaha Mikro Kecil Menengah Agribisnis. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen. Pada Fakultas Ekonomi. Disampaikan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Cenderawasih.
- Rawls John. 1995. A Theory Of Justice. Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori-Teori Keadilan. Howard University Press. Cembridge. Messaahussets. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ritzer G. 2014. Modern Sociological Theory. Penerjemah: Triwibowo B.S. Teori Sosiologi Modern. McGraw. Hill. New York. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Robison, L.J., Macelo, E.S., Songqing, J. 2011. Sosial Capital and The Distribution of Household Income in The United States: 1980,1990, and 2000. *The Journal of Socio Economics* 40, 538-547
- Rosyadi, S. 2003. Community-Based Forest Management in Java, Indonesia: The Issues of Poverty Alleviation, Deforestation and Devolution. *Socioeconomics Studies on Rural Development* vol. 135 Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. Germany.
- Scott J. 2007. Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists. First Published Oxon: Routledge.
- Silo A. 2013. Model Birokrasi Kontekstual: Gravitasi Ekologis Antara Kearifan Lokal dan Globalisasi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekologi Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Cenderawasih.
- Sindung Haryanto, 2012. *Spektrum Teori Sosial. Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta.

- Strelan John G. 1977. Search For Salvation. Studies in the History and Theology of Cargo Cults. Penerjemah: D.C. Ajamiseba dan Benny Giay. Kargoisme di Melanesia Suatu studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo. Penerbitan Pusat Studi Irian Jaya. Jayapura.
- Suyanto B. 2013. Filsafat Sosial diterbitkan oleh Aditya Media Publishing. Malang.
- Uphoff, Norman, 2000. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation. Mansholt Institut Wegenigen, 13 Sept.
- Veplum D. 2013. Dinamika Interaksi Sosial dan Bentuk Kelompok Etnik. Diterbitkan oleh UNCEN PRESS.
- Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.*
- Wiranata I Gede A.B. 2010. Antropologi Budaya. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Jurnal

- David W. Shideler, David S. Kraybill, 2009. Social Capital: An analysis of Factor Influencing Investment. The Journal of Socio-Economics. 38.PP:443-455.
- J. Mawardi M. 2007. Peranan Sosial Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3 Nomor 2.*
- Jones S. 2005. Community-Based Ecotourism the significance of Sosial Capital. *Annals of Tourism Research Vol. 32 No 2.*
- Jones, N. 2010. Enviromental activation of citizen in the context of policy agenda formation and the influence of sosial capital. *The Sosial capital Journal 47, 121-136*
- Kartika Sunu Wati, 2015. Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta). Jurnal Idea Societa. Vol. 2, No. 5. (2015) Oktober. Diakses 13 Pebruari 2017.
- Meteray B. 2016. Penguatan Demokrasi di Tanah Papua di Era Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005. Di terbitkan Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial. LIPI. Vol. 42 No. 1 Juni 2016.
- Putnam, R. D. 1996. "Who Killed Civic America?" Prospect. 7. 24. 66-72.
- Sartini. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Firsafat. No. 1 Januari- Juli 2012.

- Shideler, DW., Kraybill, DS. 2009. Social Capital: An Analysis of Factor Influencing Investment. *The Journal of Social Economics* 38, pp: 443-455
- Sutarto, Dendi dkk. Model Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal. Tepung Tawar pada Komunitas Talang Sejempit Lahat Sumatera Selatan. Laporan Pengkajian atau analisisn Fundamental Universitas Sriwijaya.
- Syahra R. 2003. Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, volume 5 No. 1 Tahun 2003 LIPI. Jakarta.
- Woolcock, Michael. 2001. Social Scientist, Development and Research, Social Capital Participant in the Seminar Held by the Performance and Innovation Unit.
- Yenrizal. Kearifan lokal dan Nilai Demokrasi Lokal Masyarakat Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*. Vol. 15 No. 1 Januari-Juli 2012.
- Yuli Surya Dewi, 2012. Pola Sosialisasi Pendidikan Karakter. *Jurnal* Vol. 01 No. 01 (2012) Diakses 13 Pebruari 2017.

Internet Blog/Web Site

- Afifah Riana. 2012, <http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/25/1135451/3>. Hal yang mesti dibenahi dalam program afirmasi. Diakses 4 April 2015.
- M. Syahrani Jallani. Ragam Pengkajian atau analisisn Qualitative (Etnografi, Fenomenologis, Grounded Theory, dan Studi Kasus). Artikel. Pdf-Adobe Acrobat Document. Diakses 30 Juli 2017.
- Samdin. 2004, Religius Capital dan Keberhasilan Bisnis (Studi Pada Masyarakat Muslim Gu-Lakudo, Sulawesi Tenggara). Artikel Studi. Pdf-Acrobat Document. Diakses 25 Juli 2017.
- Suharto, Edi. 2005. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. (<http://www.Policy.Hu/suharto/Naskah> – Pdf (Secured-adobe Reader). Diakses 20 Oktober 2015
- 2013. Modal Sosial Dalam Pembangunan. [htt: /www](http://www): Naskah. Pdf-Adobe reader.
- Zukhrufarisma. 2012 <http://Zukhrufarisma.wordpress.com/2012/06/06/affirmative-action>. Diakses 17 September 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Hadi Setia Tunggal. 2011. Himpunan Peraturan Otonomi bagi Provinsi Papua Pemerintah Aceh dan Pemerintah DKI Jakarta. Harvarindo. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.

PROFIL PENULIS

Dr. Lodewijk Luis Wanggai, S.E., M.MT.



Penulis lahir di Manokwari, 3 Juni 1968, Menikah dengan Mariana Tin Wambrauw, S.Pd dan mempunyai dua orang Putri, yaitu Virginia F. Wanggai dan Enggelina S.N. Wanggai.

Menyelesaikan SD YPPK Padma II Manokwari Tahun 1983, SMPN I Manokwari Tahun 1986, SMAN 415/I Manokwari Tahun 1989. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Tahun 1995, gelar Magister Manajemen Teknologi Jurusan Manajemen Lingkungan di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Tahun 2002, meraih gelar Doktor dalam bidang kajian Ilmu Sosiologi di Universitas Cenderawasih Tahun 2020.

Pernah menjabat beberapa jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua diantaranya, sebagai Kepala Seksi Pengupahan, Kepala bidang Pengupahan dan Syarat Kerja, Kepala bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala bidang Pengawasan Ketenagakerjaan maupun pernah di tunjuk sebagai Ketua Tim Mediator Provinsi Papua tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Freeport Indonesia beserta Dirjen PHI dan Jamsostek Tahun 2011.

Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan diantaranya, Pendekatan Modal Sosial dalam Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Wilayah Pembangunan Adat, *Social Capital Strengthening Model in the Framework of the Employment Expansion for Native Papuan in Manokwari Districk, West Papua*, Perluasan Lapangan Kerja (Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua).

PERLUASAN LAPANGAN KERJA

(Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)

Tulisan ini memberikan sebuah Perspektif baru dalam memahami dan memaknai arti Perluasan Lapangan Kerja, sebagai upaya strategis dalam perencanaan Tenaga Kerja, baik di sektor formal maupun sektor informal bagi Orang Asli Papua, hal ini diwujudkan dalam model penguatan Strukturisasi modal sosial dan modal lainnya, berkenaan dengan implementasi elemen-elemen Kepercayaan, Jaringan, Norma maupun Nilai yang dikonversikan kedalam modal ekonomi, budaya dan simbolik sebagai hubungan maupun peran dalam melakukan tindakan atau kewenangan serta harapan bagi Orang Asli Papua yang ada di Tanah Papua.

Hal ini sebagai langkah kebijakan dalam Pembangunan Ketenagakerjaan sudah seharusnya Representasi Kultur Penentu bukan saja menjadi lembaga budaya politik, yang situasional disaat Papua dilanda konflik politik atau dengan kata lain lembaga pemadam kebakaran, tetapi sudah seharusnya berkolaborasi dengan Pelaksana Kebijakan maupun Pembuat Kebijakan dalam rangka pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, sebagai wujud dan strategi yang dijalankan dengan semangat Otonomi Khusus.